

075

Zhi Fu Shi

TINTA EMAS

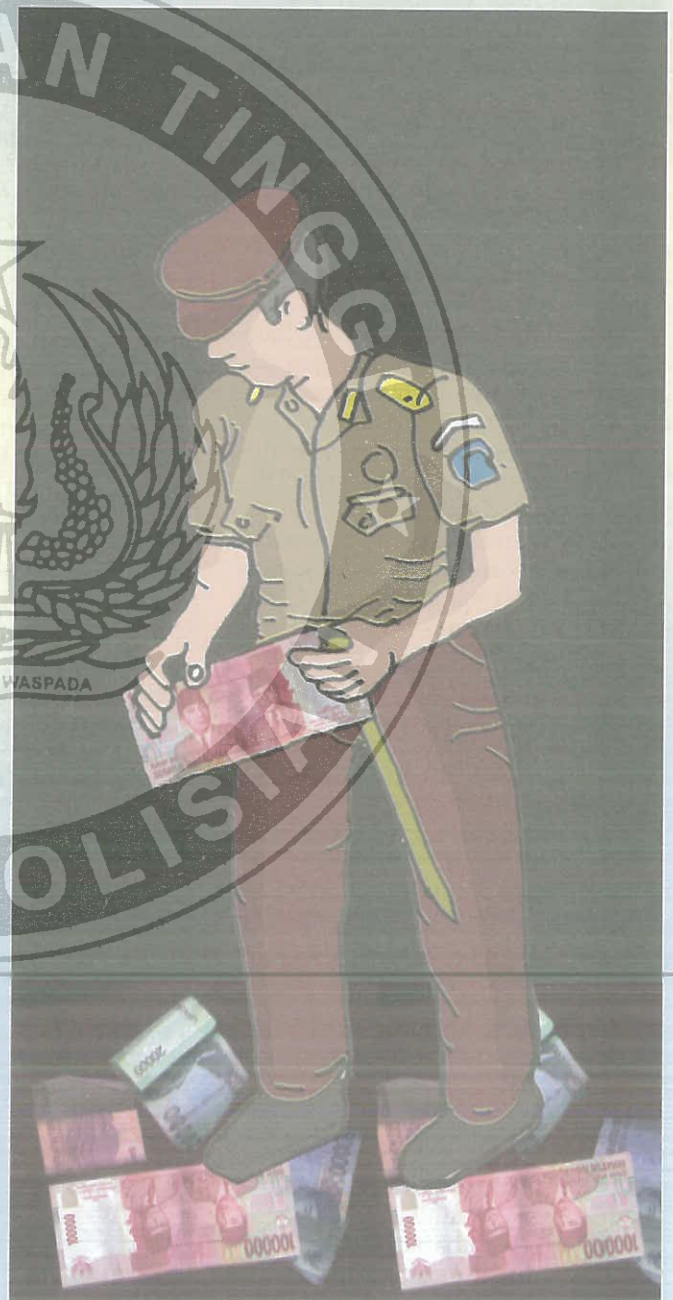
Dalam suatu dialog interaktif "Kick Andi" yang ditayangkan Metro TV pada tanggal 3 Juni 2007 menghadirkan seorang veteran pejuang kemerdekaan RI, pertanyaannya tidak rumit dan juga tidak membutuhkan jawaban konseptual atau strategis. Yang ditanyakan adalah "Apakah beliau bangga dengan status sebagai veteran pejuang yang telah merebut kemerdekaan dari tangan penjajahan. Jawabannya sungguh sangat simpel, namun sarat dengan pesan moral dan nilai-nilai pejuang sejati. Beliau menjawab bahwa beliau tidak mempunyai hak untuk menilai apa yang sudah beliau dedikasikan kepada negara dan bangsa. Pesan lain yang beliau sampaikan diakhir dialog adalah agar generasi muda harus tetap ingat sejarah bangsanya.

Dialog dan pesan moral itu menjadi penting dan sarat dengan makna serta perenungan kedalam relung-relung nurani, apalagi dikaitkan dengan usia ke 61 Polri di tahun 2007 ini. Usia yang bila diasosiasikan dengan rentang usia manusia, maka sudah sangat matang alias paripurna. Namun usia itupun dapat dikatakan masih teramat belia bila kita melihat atau mensejajarkannya dengan perjalanan panjang sejarah-sejarah kepolisian universal.

Tulisan kali ini tidak akan mengulas secara khusus sejarah masa lalu dan kelahiran Polri, namun tidak berarti juga melupakan apa-apa yang menjadi titik-titik perjalanan sejarah Polri. Suka dan duka, guncangan dan terpaan badai hebat serta cobaan silih berganti mewarnai lembar-lembar sejarah Polri. Banyak tinta emas ditorehkan didalamnya, tidak sedikit tinta hitam mencorengnya, bahkan ada juga tinta hitam yang dimanipulasi warna keemasan. Ironisnya pula banyak tinta emas yang tidak sempat atau belum digoreskan, entah apa alasannya.

LUBANG PERANGKAP LIBERALISME

Linda S. Miller dan Karen M. Hess dalam bukunya *Community Policing* mengemukakan bahwa era kepolisian modern dimulai ketika Sir Robert Peel membentuk Kepolisian Metro London, yang mana Peel menetapkan beberapa prinsip yang harus dipedomani oleh satuan kepolisian antara lain; *pertama*, Polisi bertugas



Guangrong

Oleh Boy Salamuddin

untuk mencegah kejahatan dan ketidak-tertiban. *Kedua*, Kekuasaan polisi dalam menjalankan tugasnya adalah tergantung persetujuan masyarakat dan kemampuannya guna menjaga dan memelihara kehormatan umum / masyarakat dan yang *ketiga*, keberhasilan efisiensi kepolisian diuji dari ketiadaan tindak kejahatan dan ketidak-tertiban, bukan semata-mata hanya tindakan-tindakan kepolisian dalam menangani masalah-masalah ini.

Filosofis kepolisian universal sudah mengglobal dan menjadi bagian atau sejiwa dengan prinsip-prinsip dasar tugas pokok Polri. Yang menjadi pertanyaan untuk kita berkontemplasi dalam konteks 61 tahun Polri adalah bagaimana Polri mengaktualisasikan dan merevitalisasi prinsip-prinsip itu ditengah berlangsungnya fenomena multi krisis manusia-manusia Polri ?

Globalisasi adalah fenomena dunia, suka dan tidak suka dia akan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Fenomena ini telah menyihir miliaran penduduk dunia dan menimbulkan akibat dan implikasi masif terhadap berbagai kehidupan dan peradaban manusia. Tidak terbayangkan pada satu dekade yang lalu seorang Kapolri dalam waktu bersamaan dan serentak dapat berinteraksi serta berkomunikasi secara langsung dengan para Kapolda seluruh Indonesia. Perubahan progresif teknologi komunikasi dan transportasi meminimalkan hambatan dimensi ruang, waktu dan tempat dalam komunikasi sosial. Namun dinamika alam akan selalu kembali kepada kodrat keseimbangan dan keserasian. Ada sisi menguntungkan dari globalisasi, namun terdapat juga dampak atau impak serius terhadap Indonesia.

Globalisasi yang diidentikkan dengan demokratisasi, apresiasi HAM (sebagai catatan harus tetap ada keseimbangan atas kewajiban azasi manusia / KAM), liberalisasi ekonomi dan perdagangan memberikan peluang pencerahan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Reformasi 1998 merupakan kelahiran baru bangsa Indonesia dan menjadi jiwa amandemen UUD 1945. Reformasi konstitusional telah membuka-membuka sekat-sekat birokrasi, kontrol atau filter sosial budaya dan kesadaran hukum masyarakat. Namun apa yang terjadi kemudian fenomena sosial yang muncul menjadi liar ketika masyarakat mabuk dengan euforia reformasi,

ketidak-patuhan menjadi pandangan keseharian, chaos dan anomali hukum hampir menjadi habitual / kebiasaan.

Kita tidak menafikan apa yang dikatakan Abraham Maslow tentang hirarkhi kebutuhan manusia, karena nyatanya manusia adalah mahluk hidup. Ada kebutuhan yang harus dipenuhinya, hanya yang perlu direnungkan adalah apakah ketika manusia memenuhi kebutuhannya harus menerapkan adagium *homo homini lupus* atau menjadi machiavelis. Masyarakat milenium sudah diperbudak oleh penyakit global dan liberal. Gaya dan sikap hidup individualis, materialis, hedonis dan konsumtif adalah dampak kerapuhan keimanan dan ketaqwaan, degradasi sikap disiplin, toleransi dan kepedulian sosial serta dekadensi etika dan moralitas. Seorang atasan atau pejabat tidak sungkan atau malu lagi memamerkan penyakit global dan liberal yang dideritanya itu. Pengejaran status sosial, perebutan posisi atau jabatan menjadi tolok ukur keberhasilan, bukan sebaliknya sebagai amanah atau jenjang strategis dalam meningkatkan pengabdian. Kekayaan material menjadi cita-cita dan obyek kompetisi diantara sesama kolega atau bahkan antara atasan dengan bawahan. Ironisnya mereka yang berhasil secara material / ekonomis sering kali atau lebih diuntungkan mendapatkan peluang dan kesempatan lebih banyak untuk terus berkompetisi dan meraih promosi jabatan. Kuntjoroningrat mengatakan bahwa " bangsa kita adalah bangsa yang senang menerabas, ingin cepat kaya, dan bermental feodal serta berorientasi ke atas ".

Apakah ada kaitannya judul diatas *Zhi Fu Shi Guangrong* dengan fenomena sosial ini. Ungkapan *Zhi Fu Shi Guangrong* disampaikan oleh mantan Perdana Menteri China Deng Xiaoping yang artinya " Menjadi kaya itu mulia ". China yang selama ini dikenal sebagai negara sosialis komunis kini berubah radikal menjadi negara kapitalis. Kapitalisme adalah kemutlakan bagi masyarakat China. Ini menandakan keberhasilan liberalisme yang selama ini dimusuhi oleh negara-negara sosialis komunis. Refleksi liberalisme dalam keseharian adalah budaya materialis, konsumtif, individualis dan hedonis. Kalau di era TNI/ABRI kita mengenal ada Dwi Fungsi ABRI, kini di era kontemporer dan reformasi muncul Dwi Peran Polri. Ada kesan

kelaziman dua peran sekaligus dilakukan, yang pertama sebagai petugas Polri dan yang satunya sebagai pengusaha. Fenomena ini berpulang kepada nurani-nurani insan Tribrata, apakah kita sudah terhinggapi atau terkontaminasi fenomena *Zhi Fu Shi Guangrong*? Dalam konteks ini maka kepemimpinan menjadi rancu atau bahkan bias. Kewibawaan yang dipersyaratkan bagi seorang pemimpin hanyalah makna kosong dan teoritis. Sikap altruistik, kebersamaan atau soliditas yang selama ini susah payah kita rekatkan menjadi retak dan tinggal menunggu saatnya pecah berserakan. Ada paradoks Abraham Maslow dengan Deng Xiaoping disatu sisi, namun juga terdapat benang merah kebutuhan manusia dengan justifikasi menjadi kaya.

AMANDEMEN UUD 1945 DAN IMPLIKASINYA

Keempat amandemen UUD 1945 adalah *conditio sine qua non* dan menjadi fakta sejarah konstitusi Indonesia. Ada pertentangan dan beda argumentasi apakah amandemen itu merupakan suatu prestasi ataukah sebaliknya harakiri sejarah. Banyak pasal yang diaman-demen dan terdapat pasal-pasal yang adendum, yang sebagian besar memperkuat posisi dan dominasi politik lembaga legislatif. Polri harus bersyukur dengan reformasi 1998 yang mendorong terjadinya keputusan politik pemisahan Polri dari TNI/ABRI. Polri kini menjadi mandiri dalam artian diberikan mandat penuh untuk menjalankan tugas pokoknya. Kemandirian ini merupakan tuntutan prinsip dan standard *Democratic Policing*, yang sekaligus juga mengharuskan Polri mem-berlakukan prinsip transparansi dan akuntabel publik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Lembaga dengar pendapat "*check and balance*" sudah menjadi biasa untuk pejabat-pejabat Polri. Ini adalah lembaga kontrol legislatif terhadap mandat rakyat yang diberikan kepada Polri, termasuk uang rakyat dalam bentuk anggaran Polri.

Amandemen memberikan kesan "superioritas atau dominan" DPR terhadap eksekutif, termasuk Polri didalamnya. Calon pimpinan Polri harus meliwati *Fit and Proper Test*. Mekanisme ini sarat dan berpotensi adanya konflik kepentingan dan "hutang budi" pejabat Polri terpilih. Kondisi ini juga membuka peluang KKN antara oknum-oknum di lembaga legislatif dengan personil Polri yang mengharapkan dukungan politik untuk promosi pangkat atau jabatan. *Networking / jejaring* kemudian terbentuk dengan basis kepentingan yang "*simbiose mutualistis*"

Menarik apa yang disampaikan oleh Prof Syafii Maarif dalam Tajuk Rencana "Nurani dan Akal Sehat" (Kompas, 30 Mei 2007). "Hilangnya nurani dan akal sehat membuat kita cenderung memikirkan diri kita sendiri, kita kehilangan kepekaan dan kepedulian terhadap kehidupan masyarakat yang lebih besar". Sikap altruistik sudah melemah, toleransi dan kepedulian sosial lebih banyak pada nuansa seremonial dan formalitas belaka. Secara perlahan namun pasti dan

nyata generasi muda Polri Indonesia mengalami krisis identitas dan integritas moral. Perlahan namun pasti Polri memasuki hutan *Homo Homini Lupus* yang berujung pada hancurnya kredibilitas Polri, lebih buruk lagi adalah dicabutnya mandat Polri.

KITA HARUS BERUBAH

Suatu masyarakat atau bangsa menjadi maju disebabkan karena ada kehendak atau keinginan ingin berubah, hal ini persis seperti yang dinyatakan dalam kitab suci Al Quran bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib manusia, bila manusia itu sendiri yang merubahnya. Pertanyaannya adalah perubahan yang seperti apa, bagaimana mencapainya dan siapa yang harus atau bertanggung jawab untuk melakukan semua itu?

Kita menyepakati tiga pilar reformasi Polri. Aspek kultural diakui menjadi bagian yang rumit dan sulit, karena unsur utama dan mendasar dari perubahan aspek ini adalah manusia dan kultur yang interaktif. Apalagi tesis Kuntjoro n i n g r a t sudah menegaskan demikian.



Tetapi kita harus berubah dan berubah, sebab kalau tidak jangan salahkan reformasi sosial akan memangsa Polri dan rakyat mencabut mandatnya Polri sebagai lembaga mandiri. Merujuk apa yang seringkali diceritakan oleh AA GYM dengan 3 M, yaitu "mulai dari diri kita sendiri, mulai dari yang kecil dan mulai dari sekarang".

Frase-frase ini harus menjadi kata-kata bertuah, sarat makna, *driving force* dan pijakan moral kita untuk pencerahan kembali menjadi Insan Tri Brata.

Jabaran atau elaborasi frase itu kedalam kebijakan Polri harus dimulai dari antara lain; *pertama*, pemberdayaan kelompok menengah (yang kelak akan menjadi generasi penerus) dalam mengaktualisasikan *Grand Strategy* Polri. Mereka-lah yang kemudian akan dikedepankan sebagai *frontier*, *agent of change*, *driving force* dan *promotor* sekaligus eksekutor turunan *Grand Strategy* yang berbentuk rencana strategi jangka menengah dan rencana kerja tahunan yang lebih realistis dan operasional. *Kedua*, secara bersama segenap komponen Polri melakukan penataan ulang yang bersifat sentrifugal, kita menjadi sapu bersih untuk diri dan lingkungan kita, apapun bentuk dan kondisinya **h a r u s**

merupakan cerminan kebersihan nurani atau moral. *Ketiga*, Polri harus terus memberdayakan atau mengintensifkan peran *stake holders* dalam menjalankan fungsi kontrol yang sesuai dengan prinsip *democratic policing*. Peran mereka diharapkan juga sebagai *determinant force* dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi personil Polri. *Keempat*, perlu dilakukan deregulasi kebijakan atau desentralitis kewenangan *tour of area* dan *tour of duty* jabatan setingkat KBP serta pendidikan pengembangan umum / khusus kepada Polda selaku Kesatuan Induk Penuh, sehingga beban birokrasi Mabes Polri berkurang dan lebih berfokus pada perumus kebijakan nasional di lingkup Polri. Kebijakan ini diharapkan mendorong dinamika *policing* satuan kewilayahan menjadi lebih optimal, efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja dan citra Polri sebagai polisi sipil yang demokratis. *Terakhir*, kita secara bersama perlu pencerahan terhadap makna kepemimpinan, kebersamaan, toleransi dan kepedulian sosial. Mengutip kuliah umum Gubernur Lemhannas pada peserta PPRA XL tahun 2007 tentang idealisasi standar pemimpin yang memadai di era yang penuh dengan turbulensi perubahan dan globalisasi saat ini yaitu:

- Kepemimpinan yang mampu melakukan perubahan (*Change leadership*)
- Kepemimpinan yang mampu berinteraksi, beradaptasi dan berposisi ditengah perubahan global, namun tetap mengakar pada nilai-nilai kearifan lokal dan nasional (*Global leadership*)
- Kepemimpinan yang mampu merumuskan visi bersama, artinya visi yang dirumuskan berdasarkan pendekatan *bottom up* yang bersumber dari petugas pelaksana terdepan Polri dan masyarakat sebagai *stake holder*.
- Kepemimpinan yang mampu mendorong pembangunan atau pengembangan profesionalisme organisasi
- Kepemimpinan yang mampu mentransformasi nilai-nilai luhur Pancasila, moralitas, integritas dan memotivasi para pengikutnya untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dan bangsa.

Mungkin sementara pihak mengomentari idealisasi ini diawang-awang, tidak realistis atau membumi. Namun kalau kita mau jujur dan jernih berpikir melihat sejarah dan peradaban manusia ke belakang, maka orang-orang besar pada zamannya adalah mereka yang mempunyai mimpi dan berusaha keras untuk mewujudkannya. Hanya kitalah yang kan merubah Polri.

Dirgahayu Bhayangkara Polri semoga Allah yang Maha Pemberi rahmat memberikan Visi yang terbaik bagi setiap insan Tri Brata menuju Polri yang sipil, yang dimiliki dan dicintai serta dibanggakan masyarakat Amin.

Jakarta, 1 Juli 2007
BOY SALAMUDDIN



KAPOLRES JAKARTA BARAT
BESERTA STAF & JAJARAN

Mohon Doa Restu

SEMOGA POLRI DI USIA 61
MAKIN DEKAT DENGAN MASYARAKAT

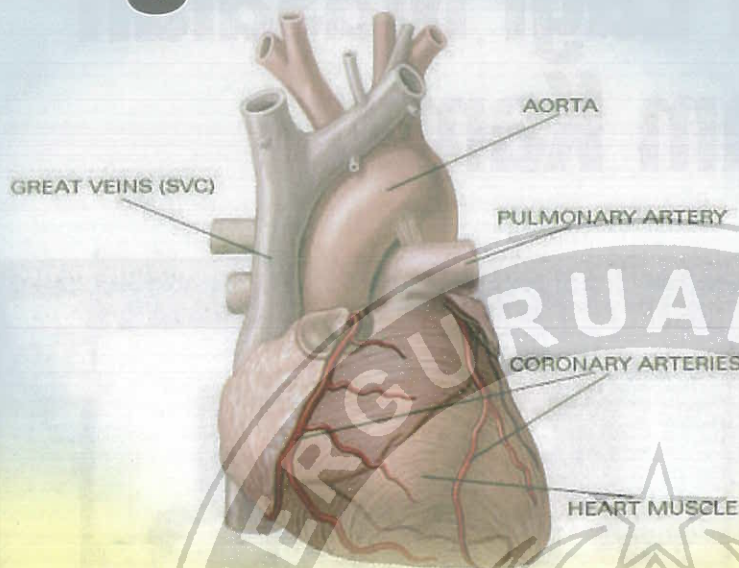
JAKARTA, 1 JULI 2007

Drs. EDWARD S PERNONG

KOMISARIS BESAR POLISI



Angin Duduk



KEMARIN ada seorang teman di kantor yang meninggal di usia yang ke-31 dengan status *single*. Menurut dokter-dokter yang turut melayat, kemungkinan penyebabnya adalah angin duduk, karena pagi harinya dia masih masuk kantor, walaupun pada saat jam istirahat minta izin pulang karena kepalanya pusing.

Kebetulan yang bersangkutan tidur sekamar dengan kakak perempuannya yang juga bekerja di kantor yang sama dan masih sempat terbangun karena adiknya menyanakan minyak kayu putih sekitar setengah 12 malam. Tapi ketika paginya dibangunkan untuk berangkat ke kantor, ternyata sang adik sudah meninggal dalam posisi tidur dengan wajah sedikit menahan rasa sakit, dan wama kebiruan sekitar leher.

Atas dasar itulah saya informasikan sedikit mengenai angin duduk atau nama kerennya "Sindrom Jantung Koroner Akut". Umumnya, hanya dalam 15 menit sampai 30 menit, orang yang terserang angin duduk bisa langsung meninggal.

Padahal, penderita, sebelumnya terlihat sehat-sehat saja. Dunia kedokteran selama dua tahun terakhir berhasil mengidentifikasi istilah baru penyakit jantung yang akrab disebut angin duduk. Ternyata, penyakit ini tak sekedar masuk angina berat, tetapi identik dengan Sindrom Serangan Jantung Koroner Akut (SSJKA).

Teridentifikasinya istilah ini, menurut Guru Besar Bidang Ilmu Penyakit Dalam FKUI, Prof

DR dr Teguh Santoso, SpPD : Menandai sebuah koreksi besar terhadap mitos yang berkembang di masyarakat selama ini. Bahwa masuk angin hebat itu adalah penyakit yang berbahaya, bahkan bisa menimbulkan kematian hanya dalam waktu 15 hingga 30 menit sejak serangan pertama.

Jadi kata Teguh lagi, jika Anda tiba-tiba merasa nyeri dada, sebaiknya tidak melakukan aktivitas fisik apapun termasuk berhubungan seks. Segeralah pergi ke rumah sakit yang menyediakan fasilitas penanganan gawat darurat jantung. Ingat! Tidak boleh lebih dari 15 menit setelah serangan nyeri pertama.

Sindrom serangan jantung koroner akut merupakan penemuan terbaru akhir banyak disikapi masyarakat dengan tindakan yang salah. Misalnya, penderita dikerok, diberi minuman air panas atau diberi ramu-ramuan untuk mengeluarkan angin. Padahal, penderita bisa meninggal mendadak tanpa ada tanda-tanda sakit.

GEJALANYA :

1. Muncul keluhan nyeri ditengah dada, seperti rasa ditekan, rasa diremas-remas, menjalar ke leher, lengan kiri dan kanan, serta ulu hati.
2. Rasa terbakar dengan sesak napas dan keringat dingin. Keluhan nyeri ini bisa merambat ke kedua rahang gigi kanan atau kiri, bahu, serta punggung.
3. Lebih spesifik, ada juga yang disertai kembung pada ulu hati seperti masuk angin

atau maag. Tapi sesungguhnya, sumber masalah hanya terletak pada penyempitan pembuluh darah jantung (vasokonstriksi).

PENYEMPITAN INI DIKAKIBATKAN OLEH EMPAT HAL :

1. Pertama, adanya timbunan lemak (aterosklerosis) dalam pembuluh darah akibat konsumsi kolesterol tinggi.
2. Kedua, sumbatan (trombosis) oleh sel beku darah (trombus).
3. Ketiga, Vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah akibat kejang yang terus menerus.
4. Keempat, infeksi pada pembuluh darah.

Penyempitan itu, lanjutnya lagi, mengakibatkan berkurangnya oksigen yang masuk ke dalam jantung. Ketidak-seimbangan pasokan dengan kebutuhan oksigen pada tubuh mengakibatkan nyeri dada yang dalam istilah medisnya disebut angina.

Namun kata Teguh, hendaknya dibedakan antara keluhan nyeri pada Sindrom Serangan Jantung Koroner Akut (SSJKA) dengan serangan jantung koroner (SJK) (infark miokard). Pada SJK, angina terjadi akibat sumbatan total pembuluh darah jantung karena aktivitas fisik yang berlebihan. Sementara pada SSJKA angin terjadi akibat sumbatan tidak total yang dirasakan saat istirahat.

"SSJKA ini memang mendadak. Bukan karena capek, masuk angin, atau penyakit-penyakit lainnya. Biasanya penderita akan meninggal paling lama lima belas menit setelah keluhan rasa nyeri pertama kali dirasakan," kata Teguh.

Masyarakat diminta waspada terhadap keluhan angin ini. Soalnya penderita sebelum terserang akan tampak sehat-sehat. Solusi satu-satunya hanyalah melonggarkan sumbatan yang terjadi, yaitu dengan memberikan obat anti platelet (sel pembeku darah) dan anti koagulan. Atau, obat untuk mengantisipasi ketidak-seimbangan suplai oksigen dan kebutuhan oksigen. Misalnya nitrat, betabloker, dan kalsium antagonis.

Di tempat terpisah, ahli jantung RS Jantung Harapan Kita dr. Santoso Karo-Karo MPH, SpJp mengungkapkan kondisi rumah sakit di Indonesia tidak terlalu bisa diharapkan untuk pengobatan SSJKA. Rumah sakit terkesan lambat menangani pasien. Untuk itu ia menyarankan agar penderita yang sudah tahu bahwa dirinya memiliki gangguan jantung sebaiknya membawa tablet antiplatelet ke manapun ia pergi.

Obat antiplatelet yang paling murah dan gampang dicari adalah aspirin. Obat ini selain bermanfaat sebagai pertolongan pertama mengatasi nyeri dan melonggarkan kembali pembuluh darah yang tersumbat oleh trombosit atau platelet (sel pembekudarah).
